

## LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG

Sebagai wujud keterbukaan informasi publik, Perum BULOG menyampaikan dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Direksi dan Dewan Pengawas. Adapun LHKPN yang belum tercantum berasal dari anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang memiliki latar belakang non-pejabat struktural/penyelenggara negara maupun yang baru menjabat, sehingga pelaporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih dalam proses.

[DOKUMEN SELINGKAPNYA →](#)

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG

DIREKSI

<https://www.bulog.co.id/tentang-kami/manajemen/kepemilikan-dan-saham/>



**Ahmad Rizal Ramdhani**  
Direktur Utama



**Marga Taufiq**  
Wakil Direktur Utama



**Febby Novita**  
Direktur Bisnis



**Hendra Susanto**  
Direktur Keuangan



**Mokhamad Suyamto**  
Direktur Operasional  
dan Pelayanan Publik



**Sudarsono Hardjosoekarto**  
Direktur SDM dan Umum



**Prihasto Setyanto**  
Direktur Pengadaan



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : **BUMN/BUMD**  
**LEMBAGA** : **PERUM BULOG**  
**UNIT KERJA** : **WAKIL PIMPINAN TERTINGGI**

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **MARGA TAUFIQ**
2. Jabatan : **WAKIL DIREKTUR UTAMA**
3. NHK : **730486**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **7.208.805.000**

1. Tanah Seluas 19539 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI  
Rp. 586.170.000
2. Tanah Seluas 25000 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI  
Rp. 750.000.000
3. Tanah Seluas 15000 m2 di KAB / KOTA POSO, HADIAH Rp.  
750.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 1084 m2/360 m2 di KAB / KOTA  
KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI , WARISAN , Rp.  
1.800.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 561 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA  
MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000.000
6. Tanah Seluas 14640 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI  
Rp. 512.400.000
7. Tanah Seluas 5421 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI  
Rp. 189.735.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 841 m2/841 m2 di KAB / KOTA  
LUWU, WARISAN Rp. 420.500.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **350.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA ZIP LANDCRUISER Tahun 1996, HASIL  
SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOBIL, HONDA SEDAN HRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.



150.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. ----

**D. SURAT BERTHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 750.000.000

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. 330.000.000

**Sub Total**

Rp. 8.638.805.000

**III. HUTANG**

Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 8.638.805.000

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : BUMN/BUMD  
**LEMBAGA** : PERUM BULOG  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT BISNIS

**I. DATA PRIBADI**

- Nama** : FEBBY NOVITA
- Jabatan** : DIREKTUR
- NHK** : 234077

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>4.000.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/220 m2 di KAB / KOTA BOGOR, WARISAN Rp. 4.000.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>319.000.000</b>
1. MOTOR, PIAGGIO SCOOTER Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000		
2. MOBIL, FORTUNER TAHUN 2019 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>65.000.000</b>
<b>D. SURAT BERTAHAGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.087.018.000</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.471.018.000</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.471.018.000</b>

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : BUMN/BUMD  
**LEMBAGA** : PERUM BULOG  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT KEUANGAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : HENDRA SUSANTO
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 107077

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.057.210.000

1. Tanah Seluas 896 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 8.960.000
2. Tanah Seluas 685 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 6.850.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 390 m2/277 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , Rp. 3.041.400.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 336.911.060

1. MOBIL, NISSAN MARCH MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 148.200.000
2. MOBIL, SUZUKI IGNIS GX AT TM2FX (4X2) A/T / MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 188.711.060

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 717.063.950

**D. SURAT BERTAHAP** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 10.194.752.740

**F. HARTA LAINNYA** Rp. 26.968.800

**Sub Total** Rp. 14.332.906.550

**III. HUTANG** Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 14.332.906.550

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2024/Periodik - 2023)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : **BUMN/BUMD**  
**LEMBAGA** : **PERUM BULOG**  
**UNIT KERJA** : **DIREKTORAT SUPPLY CHAIN DAN PELAYANAN PUBLIK**

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **MOKHAMAD SUYAMTO**
2. Jabatan : **DIREKTUR SUPPLY CHAIN DAN PELAYANAN PUBLIK**
3. NHK : **188233**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **5.755.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m<sup>2</sup>/90 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.160.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m<sup>2</sup>/54 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 570.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 127 m<sup>2</sup>/184 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA TEGAL , HASIL SENDIRI Rp. 625.000.000
4. Tanah Seluas 300 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA TEGAL , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m<sup>2</sup>/148 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA TEGAL , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m<sup>2</sup>/90 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **404.000.000**

1. MOTOR, HONDA SUPRA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOBIL, TOYOTA INOVA Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp.** **121.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	702.178.400
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	6.182.859.934
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	13.165.038.334
III. HUTANG	Rp.	326.148.244
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	12.838.890.090

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2024/Periodik - 2023)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : **BUMN/BUMD**  
**LEMBAGA** : **PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)**  
**UNIT KERJA** : **PT PABRIK GULA RAJAWALI I**

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SUDARSONO**
2. Jabatan : **KOMISARIS**
3. NHK : **9106**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **14.645.342.392**

1. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI  
Rp. 4.158.000
2. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI  
Rp. 4.158.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA  
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 788.437.125
4. Tanah Seluas 90 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR ,  
HASIL SENDIRI Rp. 303.529.275
5. Tanah Seluas 64045 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI  
Rp. 528.899.621
6. Tanah Seluas 1150 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI  
Rp. 19.481.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 213 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA  
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.608.194.362
8. Tanah Seluas 185 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR ,  
HASIL SENDIRI Rp. 768.453.937
9. Tanah Seluas 135 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR ,  
HASIL SENDIRI Rp. 560.646.562
10. Tanah Seluas 1125 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI  
Rp. 873.798.750
11. Tanah Seluas 854 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI



- Rp. 663.310.340
12. Tanah Seluas 1600 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 69.432.300
  13. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 21.900.375
  14. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 43.800.750
  15. Tanah Seluas 950 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 41.610.712
  16. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 43.800.750
  17. Tanah Seluas 3600 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 157.682.700
  18. Tanah Seluas 1672 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 73.234.854
  19. Tanah Seluas 1488 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 65.175.516
  20. Tanah Seluas 2228 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 97.588.071
  21. Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 87.601.500
  22. Tanah Seluas 1005 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 22.825.057
  23. Tanah Seluas 1801 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 35.073.045
  24. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/55 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 261.295.650
  25. Tanah Seluas 90 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 285.053.580
  26. Tanah Seluas 688 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 42.910.560
  27. Tanah Seluas 100 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 157.300.000
  28. Tanah Seluas 209000 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 2.413.950.000



29. Tanah Seluas 440000 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 3.811.500.000

30. Bangunan Seluas 30 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 554.040.000

31. Tanah Seluas 9000 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp. 151.800.000

32. Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp. 84.700.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. **350.800.000**

1. MOBIL, DAIHATSU FEROZA JEEP Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 32.550.000

2. MOBIL, MITSUBISHI JEEP Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 47.500.000

3. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 90.250.000

4. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 180.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. **579.600.000**

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **534.172.718**

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. **16.109.915.110**

**III. HUTANG** Rp. ---

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **16.109.915.110**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF

**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN

**UNIT KERJA** : STAF AHLI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **PRIHASTO SETYANTO**
2. Jabatan : **STAF AHLI MENTERI BIDANG LINGKUNGAN PERTANIAN**
3. NHK : **140702**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **4.920.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 334 m2/220 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 295 m2/104 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.570.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. **810.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA 70 SEPEDA MOTOR Tahun 1977, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
3. MOBIL, TOYOTA HILUX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. MOTOR, YAMAHA AIROX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
5. MOTOR, HARLEY DAVIDSON FATBOY Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
6. MOBIL, TOYOTA LAND CRUISER Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000
7. MOBIL, NISSAN CEFIRO Tahun 1990, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. **299.100.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.246.738.040
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	8.275.838.040
III. HUTANG	Rp.	1.480.100.807
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.795.737.233

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG

DEWAN PENGAWAS

<https://www.bulog.co.id/tentang-kami/manajemen/dewan-pengawas/>



**Fadjry Djufry**  
Ketua Dewan Pengawas



**Dian Safitri**  
Anggota Independen



**Arifin Seman**  
Anggota Independen



**Andi Geerhan Lantara**  
Anggota Independen



**Verdianto Iskandar Bitticaca**  
Anggota Independen



**Isy Karim**  
Anggota



**Sam Herodian**  
Anggota



**Frans B.M. Dabukke**  
Anggota



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **FADJRY DJUFRY**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN**
3. NHK : **135261**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **6.092.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 157 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 157 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 485.000.000
3. Tanah Seluas 250000 m2 di KAB / KOTA KOTABARU, HASIL SENDIRI Rp. 101.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 38 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 530.000.000
5. Tanah Seluas 340000 m2 di KAB / KOTA KOTABARU, HASIL SENDIRI Rp. 122.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 355 m2/118 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.910.000.000
7. Tanah Seluas 251 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.030.000.000
8. Tanah Seluas 13000 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 222.500.000
9. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 307.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 116 m2/176 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASAR BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.005.000.000



<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	250.000.000
1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2022, HASIL SENDIRI	Rp.	250.000.000
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	10.000.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	---
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	12.282.731.831
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	---
<b>Sub Total</b>	Rp.	18.635.231.831
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	---
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	18.635.231.831

## Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : BUMN/BUMD  
**LEMBAGA** : PERUM BULOG  
**UNIT KERJA** : DEWAN PENGAWAS

**I. DATA PRIBADI**

- Nama** : DIAN SAFITRI
- Jabatan** : ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
- NHK** : 916768

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.000.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 39.7 m2/39.7 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>D. SURAT BERTHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.425.429.880</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>4.336.194.669</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
Sub Total	<b>Rp.</b>	<b>7.761.624.549</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>7.761.624.549</b>

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERDAGANGAN  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT JENDERAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ISY KARIM
2. Jabatan : SEKRETARIS JENDERAL
3. NHK : 763108

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

**Rp. 1.780.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/120 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 810.000.000
2. Tanah Seluas 132 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/54 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

**Rp. 257.500.000**

1. MOTOR, YAMAHA VIXION Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
2. MOBIL, MITSUBISHI XPANDERCROSS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

**Rp. 12.000.000**

**D. SURAT BERTAHAGA**

**Rp. ----**

**E. KAS DAN SETARA KAS**

**Rp. 1.869.917.446**

**F. HARTA LAINNYA**

**Rp. ----**

**Sub Total**

**Rp. 3.919.417.446**

**III. HUTANG**

**Rp. 60.000.000**

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

**Rp. 3.859.417.446**

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.